

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah. Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah belanja pegawai, total pendapatan, total aset dan total penyimpangan sebagai variabel independen dan tingkat pengungkapan sebagai variabel dependen.

Dalam penelitian ini, tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh provinsi-provinsi di Indonesia dalam 3 tahun sampel penelitian ini kurang maksimal. Hal ini tercermin dari masih banyaknya daerah yang belum memenuhi secara baik pengungkapan didalam catatan atas laporan keuangannya. Hal ini dapat dilihat dari total pengungkapan yang masih dinilai rendah sesuai indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Secara parsial yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan adalah variabel total pendapatan. Sedangkan variabel belanja pegawai, total aset dan total penyimpangan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat pengungkapan.

Berdasarkan analisis dan pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, total pendapatan suatu daerah terbukti berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah. Hal ini menandakan bahwa pengungkapan yang dilakukan daerah yang bersangkutan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai pos pendapatan daerah tersebut sudah cukup wajar. Hal ini dikarenakan penjelasan mengenai pos-pos pendapatan yang dicantumkan di Catatan Atas Laporan Keuangan cukup terperinci sehingga mengungkapkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan.
2. Belanja pegawai terbukti tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa sebesar apapun total pengeluaran belanja suatu daerah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah.
3. Variabel total aset terbukti tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah. Daerah yang memiliki pengelolaan aset yang besar cenderung tidak memiliki pengelolaan aset yang kurang baik yang mengakibatkan daerah tersebut mendapatkan catatan dari pihak BPK
4. Variabel total penyimpangan terbukti tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan aparat pemerintahan terkesan menutupi penyimpangan yang terjadi dalam instansi terkait sehingga tingkat pengungkapan terhadap penyimpangan tersebut terkesan tidak diungkapkan seluas mungkin.

5. Dengan melihat nilai $F = 8.107$ dan nilai signifikansi sebesar 0,00, mengindikasikan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dikarenakan oleh nilai tersebut lebih kecil dari nilai α yang sebesar 0,05 atau 5%.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan. Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel selama 3 tahun periode penelitian, yakni 2009-2011 dan tidak menggunakan data dari seluruh provinsi di Indonesia karena ketersediaan data yang terbatas.
2. Koefisien determinasi yang masih tergolong rendah pada penelitian ini yang mencerminkan masih lemahnya kemampuan keempat variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.
3. Sulitnya menentukan indeks pengukuran tingkat pengungkapan karena tidak adanya standar yang baku yang dikeluarkan oleh pemerintah.
4. Penelitian ini hanya menggunakan Peraturan Pemerintah no 24 tahun 2005 untuk mengembangkan indikator penilaian tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian berikutnya adalah:

1. Menambah waktu pengamatan agar mengurangi bias dalam penelitian yang selanjutnya akan dilaksanakan dan menambah sampel sehingga seluruh provinsi di Indonesia dapat diukur dan diuji terkait pengungkapan laporan keuangan daerah nya.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan mengembangkan indikator tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah dengan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Menambah variabel lain diluar belanja pegawai, total pendapatan, total aset dan total penyimpangan yang turut berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah.